

## **BAB II**

### **SATUNAMA sebagai Setting Penelitian**

#### **1.1. Profil Yayasan SATUNAMA**

SATUNAMA adalah sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan, advokasi dan pelatihan. SATUNAMA dalam menjalankan program kerjanya berdasarkan visi-misi yang telah dibuat. Masyarakat paling marginal menjadi sasaran utama dalam pembuatan program , yaitu masyarakat kecil, lemah, miskin, difabel dan terabaikan.

SATUNAMA merupakan organisasi yang termasuk dalam bagian dari Unitarian Service Commite Canada yang mulai bekerja di Indonesia sejak awal tahun 1975. Pada saat itu program-program lembaga lebih fokus pada layanan kemanusiaan seperti menyumbang untuk panti asuhan, penderita lepra dan orang jompo. Dengan pengalaman tersebut, SATUNAMA memiliki pengalaman dalam mengelola karikatif, advokasi, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat yang hingga sekarang bisa dilakukan oleh SATUNAMA dalam menjalankan program/kegiatannya.

Pada tahun 1988, USC Canada memindahkan kantornya dari Jakarta ke Yogyakarta untuk mendekati diri dengan kelompok masyarakat dampingan sekaligus mengurangi kesibukan mengurus administrasi dengan birokrasi pemerintahan. Pada tahun-tahun ini, lembaga di bawah pimpinan

Meth Kusumahadi, DCM mulai meninggalkan status proyek-proyek karitatif dan mulai melakukan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dengan wilayah Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan mulai melakukan penjajagan program di Timor Leste. **Pada akhir 80-an, proyek-proyek karitatif perlahan ditinggalkan dan mulai melakukan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dengan wilayah Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan mulai melakukan penjajagan program di Timor Leste.**

Sejak 1988, USC Canada berkonsentrasi pada program memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat miskin yang memiliki kesadaran untuk membela haknya. Hal itu dikarenakan pada masa itu, kelompok masyarakat miskin benar-benar membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, USC Canada memulai program yang berfokus pada kelompok masyarakat kecil yang memiliki kesadaran untuk membela haknya di Indonesia.

Program memfasilitasi kelompok masyarakat miskin dimulai dari pelatihan perencanaan pembangunan dan manajemen organisasi untuk kader lokal, pendampingan masyarakat hingga pengembangan usaha kecil. Lembaga ini juga mempromosikan pertanian organik yang lebih ramah lingkungan untuk menciptakan kesempatan kepada petani untuk memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan teknologi lokal supaya mereka

bisa memiliki posisi tawar terhadap tekanan dari pemilik modal dan negara. Program pertanian organik berawal dari keprihatinan atas ketergantungan petani kepada produsen teknologi pertanian dan pedagang perantara serta kepedulian pada keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.

Pada awal 1990, USC Canada mengambil kesimpulan jika sumber dayanya akan lebih berguna di Negara lain. Organisasi ini menilai jika pembangunan di Indonesia pada tahun 1990 sudah meningkatkan standar hidup masyarakat sehingga mereka berniat untuk bekerja bagi masyarakat di Negara lain. Muncul gagasan membuat pusat pelatihan pada waktu USC Canada berniat hendak meninggalkan Indonesia yang tidak lagi dianggap sebagai negara miskin. Landasan berpikir munculnya pusat pelatihan ini adalah USC Canada harus meninggalkan investasi dalam bentuk mendidik manusia supaya muncul generasi penerus program-program pelayanan bagi orang miskin dan tersingkir. Ide ini awalnya muncul pada tahun 1991 tetapi baru bisa terlaksana pada tahun 1996. Pelatihan pertamanya adalah pendidikan kepemimpinan bagi orang muda dalam bidang nilai-nilai universal (HAM, demokrasi, keadilan social, tata pemerintahan yang baik, dan gender), manajemen organisasi, dan analisis sosial yang kemudian dikenal dengan nama *Civic Education for Future Indonesia Leaders* (CEFIL).

CEFIL kini menjadi produk unggulan dari SATUNAMA. CEFIL (*Civic Education for Future Indonesia Leadersip* ) diselenggarakan setiap

tahun yang dimulai dari tahun 1998 hingga kini. Kegiatan tersebut diselenggarakan lima hingga enam kali setahun selama 30 hari penuh. Dalam pelaksanaannya banyak partisipasi dari kalangan mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut.

**Landasan berpikir munculnya pusat pelatihan ini adalah USC Canada harus meninggalkan investasi dalam bentuk mendidik manusia supaya muncul generasi penerus program-program pelayanan bagi orang miskin dan tersingkir.** Pelatihan ini kemudian disusul dengan sejumlah program pendidikan publik dalam dalam rangka mengkampanyekan demokrasi melalui kesetaraan gender, dialog antar iman, hak-hak warga negara, tata pemerintahan yang baik, dan manajemen lembaga nirlaba. Pada saat sudah berubah menjadi SATUNAMA, pelatihan ini kemudian disusul dengan pelatihan-pelatihan seperti: penguatan pendidikan politik untuk organisasi perempuan (STRECEW), pendidikan politik yang disertai dengan resolusi konflik dan penciptaan perdamaian untuk tokoh agama (CEFREL), pendidikan kewarganegaraan untuk politisi lokal (CELOP), dan pelatihan sejarah pemikiran yang berisi pengantar diskusi ideologi seperti liberanisme dan sosialisme untuk para intelektual muda. SATUNAMA juga mengadakan pelatihan untuk lembaga-lembaga yang melakukan pendampingan masyarakat dengan pelatihan perencanaan program dan keuangan, pengembangan organisasi, analisis gender dalam

pembuatan program, penggalangan dana, dan pelatihan tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia.

SATUNAMA mulai melakukan penjajagan program di Timor Leste pada tahun 1991 sebagai konsultan Konrad Adenauer Stiftung (KAS). Pada tahun 1995. SATUNAMA mengadakan perekrutan staff lokal dari Timor Leste dan mulai menyelenggarakan ratusan kali pelatihan *peace building* untuk pemuda dan pemudi pendukung kelompok pro kemerdekaan dengan kelompok pro intregrasi. Pada waktu mayoritas rakyat Timor memilih untuk merdeka, SATUNAMA menyelenggarakan berbagai dialog antar warga yang berkonflik serta berbagai pelatihan dan siaran radio dengan tujuan mengurangi konflik. Hingga saat ini fasilitasi di Timor Leste masih berlanjut dengan serangkaian pelatihan pendidikan politik untuk masyarakat terutama kaum intelektual muda, aktivis, dan politisi.

Dalam rangka memperkuat organisasi rakyat miskin dan tersingkir, SATUNAMA melakukan pendampingan terhadap para pengusaha kecil dengan program pelatihan manajemen usaha kecil, pembuatan rencana bisnis, dan pengelolaan kredit. Di beberapa daerah, dalam rangka membangun solidaritas rakyat miskin, SATUNAMA memfasilitasi pembentukan koperasi rakyat yang bertujuan membantu pemasaran produk anggotanya. Koperasi rakyat ini juga memberikan pinjaman sehingga anggota bisa mengembangkan usahanya.

Untuk mendekati warga di desa dampingan, SATUNAMA membuat perpustakaan keliling untuk anak-anak. Perpustakaan keliling berusaha mengajak anak-anak untuk menyukai membaca melalui koleksi 9000 kopi buku anak dan 60 keping film. Perpustakaan keliling juga menyelenggarakan kegiatan pendukung seperti kemping, lomba lukis, dan mendongeng untuk menyebarluaskan nilai anti kekerasan, sikap bersahabat, cinta sesama dan lingkungan hidup. Pemilihan anak-anak sebagai sasaran perpustakaan juga dilandasi pemikiran pembinaan kepada orangtua perlu dilanjutkan dengan pembinaan kepada generasi penerusnya supaya program pembangunan masyarakat tersebut berkesinambungan. **Untuk mendekati warga di desa dampingan, SATUNAMA membuat perpustakaan keliling untuk anak-anak. Perpustakaan keliling berusaha mengajak anak-anak untuk menyukai membaca melalui koleksi 9000 kopi buku anak dan 60 keping film.**

SATUNAMA menggunakan radio untuk membuka wawasan masyarakat mengenai nilai-nilai HAM dan demokrasi di lingkup yang lebih luas. Mulai September 2002 Radio SATUNAMA mengudara dengan gelombang AM 864 KHz. Radio yang kini beroperasi 19 jam sehari ini memproduksi program siaran seperti features, iklan layanan masyarakat, dan konsultasi dengan tema seperti kesehatan umum, tanaman obat alternatif, pertanian, perdamaian, pekerja rumah tangga, anak jalanan, dan pemilu. Radio ini juga melakukan pendampingan kepada berbagai radio komunitas.

Ada lebih dari 25 radio komunitas di Papua, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY yang pernah mendapat bantuan pendampingan penguasaan alat teknis siaran, program siaran, hingga manajemen radio komunitas. SATUNAMA juga menerbitkan buletin sebagai bagian dari pendidikan publik mengenai demokrasi.

Dalam rangka mendanai program, SATUNAMA melayani konsultasi mengenai penguatan dan pengembangan organisasi masyarakat sipil dengan tujuan membagikan pengetahuan dari pengalaman selama bertahun-tahun. Materi pelayanan konsultasi antara lain: manajemen organisasi, merancang program pembangunan, sistem pembukuan, monitoring dan evaluasi program-program pemberdayaan masyarakat, serta berbagai pelatihan dalam bidang manajemen, resolusi konflik, serta pendidikan nilai-nilai universal. Hampir semua lembaga internasional yang bekerja di Indonesia termasuk program-program bilateral dan multilateral (seperti USAID, CIDA, GTZ/BMZ, AUSAID, UNDP, UNICEF, dan lain-lain) pernah memanfaatkan layanan konsultasi dari SATUNAMA.

SATUNAMA dalam menjalankan relasinya juga bekerjasama dengan pemerintah lokal. Departemen SATUNAMA yang intens melakukan kerjasama dengan Pemerintah yaitu Departemen Penguatan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Departemen Politik dan Demokrasi. Departemen Penguatan Masyarakat dan Desa (PMD) memiliki beberapa program inti yaitu, pelatihan dan pendampingan manajemen usaha kecil, pembuatan

rencana bisnis, pengelolaan kredit, membentuk koperasi rakyat dan membantu pemasaran produk serta memberikan pinjaman pengembangan usaha, pemenuhan dan pembelaan Hak Anak. PMD dalam misinya untuk mengembangkan desa inklusi dan demokratis dengan meningkatkan kemampuan pemerintahan desa melakukan inovasi, penataan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, dan pendayagunaan sumber daya alam dan potensi desa.

Departemen Politik dan Demokrasi yang dalam pelaksanaan programnya berfokus pada pendidikan politik dan demokrasi bagi aktivis gerakan masyarakat sipil dan politisi muda lintas partai politik. Dalam program ini, PD melaksanakan Sekolah Politik Muda yang "*Politics for Better Democracy*" yang didampingi oleh mentor-mentor terbaik. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari. Selain mendapat materi di dalam ruangan dan berdiskusi, peserta yang mengikuti kelas politik ini juga diterjunkan ke lapangan untuk memperoleh data-data ataupun persoalan yang dirasa perlu untuk diteliti. Tujuan diadakannya kelas politik ini untuk membuat generasi baru yang berkualitas, berintegritas dan beretika. Adapun kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Departemen Politik dan Demokrasi yaitu politik Cerdas Berintegritas. Yang dalam hal ini bekerjasama dengan KPK untuk membangun masyarakat khususnya generasi muda untuk mewujudkan impian Indonesia Bersih, Indonesia Bebas Korupsi. Tidak hanya itu, PD juga melakukan pengorganisasian dan advokasi untuk



kebebasan beragama/ kepercayaan dan inklusi sosial. PD juga melakukan kajian ilmiah yang dilaksanakan baru-baru ini di Yogyakarta pada Selasa, 28 Februari 2017 tentang peran perempuan dalam ranah politik, lokal maupun nasional dengan menghadiri beberapa perwakilan dari Partai Politik sebagai pemateri. Fokus dari diskusi ini yaitu merancang sekolah politisi perempuan.

Pengembangan Sektor Pengetahuan dan Media merupakan salah satu departemen SATUNAMA yang mengelola pengetahuan, mendokumentasikan dan mensistematisasikan kerja kelembagaan, mempublikasikan wacana dan kerja SATUNAMA melalui laman lembaga dan penerbitan buku, menjaga hubungan dengan stakeholder (LSM, negara dan bisnis) dan menjalin hubungan baru dalam kesinambungan relasi.

## **2.2. SATUNAMA sebagai NGO (*Non-Government Organization*)**

Selain Negara, banyak organisasi-organisasi yang di buat dan keanggotaanya tidak berhubungan dengan negara dan juga bersifat independen yaitu NGO (*Non-Government Organization*) yang dikenal di Indonesia dengan sebutan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Jika melihat tren dunia internasional beberapa dekade terakhir, maka terlihat bahwa organisasi-organisasi non-pemerintah ini mulai semakin menjamur. NGO merupakan salah satu aktor penting di dalam hubungan internasional yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal ini menjadi wajar di mana keberadaan NGO ini terbentuk karena mampu menjadi penyeimbang dari

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Tumbuhnya badan-badan ini menunjukkan bahwa NGO mempengaruhi keputusan pemerintah untuk membangun kebijakan domestik serta untuk melindungi sumber daya alam dan untuk negosiasi di dalam perjanjian internasional, serta menunjukkan bagaimana individu mampu untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan (Betsill dan Corell 2001). Sehingga dapat dikatakan bahwa NGO ini hadir sebagai penyeimbang di dalam pembuatan keputusan pemerintah. NGO juga menjadi corong bagi suara masyarakat di dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yang bersangkutan. Sehingga tidak heran jika keberadaan NGO ini menjadi semakin banyak seiring dengan arus demokrasi yang mulai menyebar ke seluruh dunia.

Di dalam melihat tujuan dibentuknya NGO sendiri tidak dapat dilihat dari satu sisi saja. NGO bekerja di dalam banyak sektor baik di lingkup nasional maupun internasional. Betsill dan Corell (2001) melihat bahwa NGO dapat berdiri dengan beberapa tujuan. Tujuan tersebut antara lain, meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu di sekitar, melobi para pembuat keputusan, mampu untuk mempengaruhi kebijakan domestik maupun luar negeri, mampu untuk berpartisipasi di dalam dan beberapa tujuan lain. Tujuan-tujuan ini kemudian diselaraskan dengan isu-isu spesifik yang menjadi konsentrasi dari dibentuknya sebuah NGO.

Keberadaan SATUNAMA dan posisi NGO lainnya turut mengubah relasi antara negara dengan masyarakat. Mereka diuntungkan karena adanya

sistem demokrasi yang saat ini banyak diaplikasikan oleh negara-negara maju maupun berkembang seperti halnya yang ada di Indonesia. Adanya sistem demokrasi ini membuka gerakan bebas para NGO untuk turut serta dalam pembangunan bangsa. Banyaknya kasus dikalangan aktor pemerintah membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada aktor perwakilan rakyat tersebut. dan dari sinilah yang akhirnya membuat masyarakat untuk mencoba menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka melalui lembaga non profit seperti NGO. Sehingga peran NGO menjadi lebih besar lagi di dalam pengambilan keputusan di sebuah negara.

Di dalam menentukan struktur, pengambilan keputusan, dan pembiayaan, akan terdapat perbedaan di setiap NGO. Hal-hal ini juga didasarkan atas dasar-dasar dibentuknya NGO-NGO tersebut. Namun dalam hal pembiayaan, mayoritas NGO mengaturnya secara mandiri melalui sumbangan-sumbangan para anggota serta donatur. Sumbangan secara sukarela ini mengingat banyak NGO yang berdiri secara independen tanpa ada sokongan dana. Hal ini seperti yang terlihat di dalam pembiayaan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, SATUNAMA. Organisasi ini banyak memiliki relasi dengan lembaga donor sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan operasional maupun untuk gaji staf.

Dari tahun ke tahun perkembangan munculnya NGO di Indonesia semakin berkembang pesat. Dalam bukunya (Fakih, 2010) tentang

Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial menjelaskan bahwa perkembangan NGO yang pesat sebagai gerakan sosial terorganisir (*organized social movement*) di Indonesia sejak 1970 sangatlah mengesankan jika ditinjau dari jumlah, keragaman serta letak geografisnya. Jika di akhir tahun 1960an dan awal 1970an hanya ada sedikit sekali gerakan sosial dan kelompok non-pemerintah yang secara aktif memiliki kepedulian dan kemampuan untuk menangani masalah-masalah pembangunan, kini keadaan tersebut sudah jauh berubah. Saat ini, dalam waktu kurang dari tiga dasawarsa terdapat lebih dari 3.000 kelompok LSM dan organisasi semacam itu yang tersebar tidak hanya di kota-kota besar di Jawa seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, melainkan telah meluas di berbagai daerah terpencil sampai ke kawasan yang tidak mudah dijangkau, hampir di seluruh Indonesia (Betts, 1987). Fokus kegiatan LSM mengalami perbedaan di diantara tahun 1970an sampai pada tahun 1980an. Pada masa 1970an kebanyakan kegiatan LSM lebih difokuskan pada bagaimana bekerja dengan rakyat di tingkat akar rumput dengan melakukan kerja pengembangan masyarakat (*community development*), sedangkan pada tahun 1980an bentuk perjuangan menjadi lebih beragam, dari perjuangan lokal hingga jenis advokasi politik untuk perubahan kebijakan baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Kegiatan yang dilakukan dalam advokasi seperti *statement* politik, petisi, lobi, protes dan demonstrasi.

SATUNAMA yang merupakan organisasi gerakan sipil di Yogyakarta yang memiliki fokus program terhadap pemberdayaan masyarakat dan Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya program pemberdayaan yang dilakukan oleh SATUNAMA, contoh salah satunya seperti Pelatihan Kepemimpinan Desa. Program tersebut bersifat berkelanjutan yang diadakan pada tahun 2013. Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa dan kader dalam bidang perencanaan desa dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Kegiatan dilaksanakan di DESA Banjaroya Kalibawang Kulonprogo, Desa Karangatun Imogiri, dan Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul. Koordinasi dan pemberian Informasi dilaksanakan dengan Pihak Desa dan Kecamatan untuk pelaksanaan program Kepemimpinan Komunitas yang Berkesinambungan.

Di Yogyakarta kehadiran aktor LSM sebagai gerakan masyarakat sipil muncul karena berbagai kasus ketidakadilan yang ada di Yogyakarta. Seperti yang ditulis dalam Thesis Pambudi (2010:43) Kasus pertama yang menyentuh kemanusiaan dan sekaligus membangunkan masyarakat Yogyakarta dari tidur lelap stabilitas politik Orde Baru adalah kasus Sum Kuning. Sum Kuning adalah nama seorang gadis penjual telur yang cantik berasal dari Godean, sebuah kecamatan di sebelah barat Yogyakarta. Sum Kuning diperkosa oleh anak seorang pembesar lokal (Pakualam) pada tanggal 18 September 1970. Dalam perkembangan kasus, mereka yang

memperkosa Sum Kuning malah dibebaskan, sedangkan Sum Kuning sendiri dipenjarakan. Kasus Sum Kuning memang tidak menggerakkan rakyat Yogyakarta untuk melakukan protes, tetapi bagi rakyat Yogyakarta kasus Sum Kuning telah menunjukkan sebuah gejala arogansi kekuasaan yang bersumber dari pusat kekuasaan. Kasus Sum Kuning menunjukkan wajah kekuasaan Orde Baru yang sesungguhnya, yakni hukum menjadi alat kekuasaan. Kalau di Bandung pada tahun 1970 muncul anarkisme massa yang dipicu arogansi taruna Akademi Polisi yang melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa Bandung karena kalah sepakbola pada tanggal 6 Oktober 1970, di Yogyakarta muncul kasus Sum Kuning. Keduanya menjadi katalis bagi "kebencian" terhadap arogansi militer dan kekuasaan Orde Baru. Namun demikian kasus tersebut lantas tenggelam begitu saja, tapi ingatan kolektif rakyat Yogyakarta terhadap kasus tersebut tidak akan pernah hilang.

SATUNAMA yang merupakan gerakan sipil menunjukkan eksistensinya dengan melakukan pendampingan terhadap masyarakat Desa di Yogyakarta dan banyak menggandeng pemerintah baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota ataupun Desa. Tidak hanya SATUNAMA, banyak LSM di Yogyakarta yang memosisikan dirinya sebagai wadah masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya kepada Negara. Namun, masih banyak juga LSM di Yogyakarta yang masih perlu dipertanyakan kredibilitasnya. Tidak sedikit LSM yang ada di Yogyakarta maupun di

daerah lainnya memposisikan dirinya sebagai gerakan sipil (*civil society*), akan tetapi posisi struktural ideologi LSM sebagai bagian dari hegemoni negara, dan oleh karena itu terdapat indikasi teoritis bahwa sebagian besar gerakan LSM di Indonesia lebih merupakan bagian dari negara ketimbang bagian dari masyarakat sipil (Fakih, 2010:153).

### **2.3 Visi dan Misi**

Visi Yayasan Satunama Yogyakarta

Indonesia yang beragam, beradab dan berkelanjutan”

Penjelasan Visi:

- 1) Beragam: Indonesia yang satu terdiri dari kemacramragaman suku, ras, bahasa, sub-kultur, keyakinan, agama, golongan.
- 2) Beradab: menjunjung tinggi martabat manusia, Hak Asasi Manusia – anti kekerasan, perbudakan, dan dominasi – menjunjung tinggi musyawarah dan demokrasi.
- 3) Berkelanjutan: Indonesia yang beragam dan beradab seperti inilah yang ingin dikembangkan dan dilestarikan.

Misi Yayasan Satunama Yogyakarta

1. Mengembangkan budaya hidup bersama yang membela hak-hak individu dan hak-hak dasar kolektif warga Negara terutama warga paling marginal.

2. Memfasilitasi tumbuh kembangnya organisasi masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak dan kewajiban warga Negara.
3. Mengembangkan tata hidup yang demokratis, berkeadilan, transparan, akuntabel dan bebas korupsi.
4. Memperkuat jaringan kerja sama antar individu, masyarakat, dan organisasi di level lokal hingga internasional
5. Memperkuat Negara memenuhi hak-hak konstitusi warga Negara.
6. Membangun budaya organisasi Yayasan, mitra dan masyarakat dampingan secara optimal.
7. Mengarusutamakan pelestarian lingkungan (SDA, Air, Energi, Perubahan Iklim) , Pengelolaan Resiko Bencana, gender, dan pemenuhan hak anak

Misi yang ada dalam SATUNAMA memiliki maksud antara lain; dalam membela hak-hak individu dan hak-hak dasar kolektif warga Negara terutama warga paling marginal yaitu warga kecil, lemah, miskin, terabaikan, dan difabel. Warga yang seperti inilah yang perlu mendapat prioritas layanan terhadap hak-haknya. Dalam memfasilitasi tumbuh kembangnya organisasi masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak dan kewajiban warga negara dengan memperkuat dalam bentuk mengingatkan, mengawasi, mengkritisi, mengoreksi, menyemangati, mendorong, dan membantu organisasi masyarakat sipil tersebut. dan untuk membuat budaya



berorganisasi yang baik dalam membangun tata hidup yang demokratis, berkeadilan, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi, SATUNAMA menandai hal itu dengan karakter organisasi sesuai dengan visi-misinya.

#### **2.4 Sumber Daya Manusia**

Yayasan SATUNAMA memiliki SDM yang sangat banyak, hal tersebut dapat dilihat dengan pembentukan SATUNAMA yang dimulai dari tahun 1993 hingga sekarang. Dan banyak produk atau kegiatan dari SATUNAMA yang membuat yayasan tersebut membutuhkan SDM yang tidak hanya dari kuantitas melainkan juga dari kualitas. SDM yang ada di SATUNAMA merupakan orang-orang terpilih yang diyakini mampu dalam menjalankan segala tugas yang diberikan oleh SATUNAMA dalam melayani kebutuhan masyarakat secara sukarela. Latar belakang dari SDM yang ada di SATUNAMA sangat baik adanya, baik dari tingkat pendidikan maupun pengalam-pengalaman mereka.

Anggota SATUNAMA berasal dari berbagai Universitas kualitas terbaik di Indonesia, diantaranya; Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, universitas Wangsa Manggala Yogyakarta, Filsafat UGM, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Institut Pertanian Bogor. Banyak karya buku-buku yang dibuat oleh anggota di SATUNAMA, antara lain; “Bergerak Bersama Rakyat, Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia”

(2007), Memecah Kesenyapan (2008), Remaja dan Perencanaan Keluarga (2010). Tidak hanya itu, salah satu anggota SATUNAM juga pernah menjadi Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Yogyakarta dan fasilitator pembaruan desa dan agraria serta menulis beberapa buku pendidikan politik dan perubahan sosial, antara lain, politik pemberdayaan; jalan keadilan (LPU, 2002).

Tidak hanya latar belakang Universitas bagus yang dimiliki oleh SDM di Yayasan SATUNAMA. Anggota dari SATUNAMA memiliki banyak pengalaman mengikuti kegiatan nasional hingga internasional. Memiliki minat besar dalam gerakan penegakan HAM, gerakan sosial dan fasilitator pemberdayaan masyarakat. Menulis di beberapa jurnal dan menulis sejumlah buku terkait praktik advokasi dan pemberdayaan. Ada pula yang cukup lama bekerja sebagai organisator masyarakat di wilayah Karesidenan Surakarta, Jawa Tengah dan kini bekerja di Program Asmat SATUNAMA di Papua. Adapun salah satu anggota Departemen PMD yang pernah mengikuti Program Religious Pluralism di Amerika Serikat pada 2010. Aktif di Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan KPO Perhimpunan Rakyat Pekerja

Berikut ini nama-nama anggota dari SATUNAMA, mulai dari direktur, ketua departemen sampai pada staff.

a) Direktur

- b) Departemen keuangan
- c) Departemen Penguatan Masyarakat dan Desa (PMD)
- d) Departemen Politik dan Demokrasi (PD)
- e) Departemen Pengelolaan Aset dan Kerumahtangaan (PAK)
- f) Unit Pembangunan Sektor Pengetahuan dan Media
- g) Unit Pelatihan dan Konsultasi (Traning & Consultancy)
- h) Unit Quality Management dan GNH

Berikut ini tabel anggota/staf dalam Yayasan SATUNAMA

Tabel 2.1. *Daftar Nama Anggota SATUNAMA*

NO.	Nama	Jabatan
1	Adi Dananto	Direktur Eksekutif Yayasan SATUNAMA
2	Insan Kamil	Wakil Direktur SATUNAMA
3	Damar Dwi Nugroho	Personil PMD
4	Emas Vidiastuty Utami	Personil PMD
5	Maria Sucianingsih	Personil PMD
6	Rizky Hening Dwi Astuti	Personil PMD
7	Valentina Sri Wijiati	Personil PMD
8	Adiyad Riyadh M. Lubis	Personil PMD
9	Suharsih	Personil PMD
10	Asep Nanda Paramayana	Personil PMD
11	Himawan S. Pambudi	Personil PMD
12	Shinta Istiana	Personil PMD
13	Afifudin Toh	Personil Departemen Politik dan Demokrasi
14	Nunung Qomariyah	Personil Departemen Politik dan Demokrasi
15	Izzul Albab	Personil Departemen Politik dan Demokrasi
16	William E Aipidely	Personil Departemen Politik dan Demokrasi

17	Juwanto	Personil Departemen Politik dan Demokrasi
18	Makrus Ali	Personil Departemen Politik dan Demokrasi
19	Kristina Viri	Personil Departemen Poilitik dan Demokrasi
20	Valerianus B Jehanu	Personil Departemen Politik dan Dmeokrasi
21	Tatik Sulistyaningsih	Pengembangan Sektor Pengetahuan dan Media
22	Bima Sakti	Pengembangan Sektor Pengetahuan dan Media
23	Ariwan K Perdana	Pengembangan Sektor Pengetahuan dan Media
24	Tatik Sulistyaningsih	Pengembangan Sektor Pengetahuan dan Media
25	Dominica Dian Nuri Ningtyas	Pengelolaan Aset dan Kerumahtanggaan
26	Elizabeth Dwi	Pengelolaan Aset dan Kerumahtanggaan
27	Kasi Mulyanto	Pengelolaan Aset dan Kerumahtanggaan
28	Framesva Yudi Ismadi	Pengelolaan Aset dan Kerumahtanggaan
29	Suhono	Pengelolaan Aset dan Kerumahtanggaan
30	Suwanto	Pengelolaan Aset dan Kerumahtanggaan
31	Mediya Juniandari	Pengelolaan Aset dan Kerumahtanggaan
32	N.G Suryanto	Pengelolaan Aset dan Kerumahtanggaan
33	Laurentia Widiati	Personil Departemen Keuangan
34	Wijaryani	Personil Departemen Keuangan
35	Cecilia Lucky Arini	Personil Departemen Keuangan
36	Monica Harini	Personil Departemen Keuangan
37	Flora Indah Dwi Julianti	Personil Departemen Keuangan
38	Gede Edy Purwaka	Deputy Director of Finance and Administration
39	Stella Maris Rani Pramita	Personil HRD
40	Veronika Rinahyu Hestiningrum	Personil HRD

41	Kantri Sekar Wandansari	Personil Unit Training dan Konsultasi
42	Yulita Rossy Hastaria	Personil Unit Training dan Konsultasi
43	Banu Badrika	Personil Unit Training dan Konsultasi
44	M.G. Setyowati	Interlokutor Yayasan SATUNAMA

## 2.6 Program Kerjasama SATUNAMA dengan Pemerintah DIY

Matrik Kerjasama yang pernah dilakukan Satunama dengan Pemerintah (Desa, Kecamatan, Daerah dan Dinas) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, periode 2012-2017

Tabel. 2.2

*Program Kerjasama SATUNAMA dengan Pemerintah DIY periode 2012-2017*

<b>Tahun</b>	<b>Program/kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh Satunama dengan pemerintah</b>	<b>Tujuan adanya kegiatan</b>	<b>Proses pelaksanaan kegiatan kerjasama</b>	<b>Mekanisme aturan main dalam pelaksanaan kerjasama</b>
<b>2012</b>	Kegiatan anak-anak di Ngablak, Sitimulyo, Bantul	Mempromosikan hak-hak anak di lokasi Tempat Akhir Pembuangan Sampah	Kegiatan ini merupakan kegiatan program anak satunama yang didukung oleh salah satu donor. Pemerintah Desa dilibatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan	Pemdes memberikan dukungan kebijakan. Sumberdaya pengelolaan kegiatan dan program mendapat dukungan dari Satunama

	Kegiatan Pertanian Organik di Gunung Kidul (Playen dan Nglipar)	Promosi pertanian organik	Kerjasama dilakukan dengan mengajak komunitas petani untuk melakukan penanaman produk-produk organik	Pemerintah desa mendukung proses-proses promosi pertanian organic
	Peringatan HPS di Sewoko Projo Gunung Kidul	Menggugah masyarakat akan pentingnya kembali kepada produk pangan lokal dan Merawat atau melestarikan sumber-sumber pangan lokal sehingga bisa menjadi komoditi pangan alternatif bagi masyarakat	Kegiatan dirangkai dalam kenduri pangan lokal masyarakat Gunung Kidul, untuk mengajak masyarakat melakukan proteksi lahan pertanian dan penyadaran kepada masyarakat tentang pemanfaatan panan lokal. Sekaligus mengenalkan sumber pangan lokal serta hasil olahannya kepada masyarakat	Pemerintah desa terlibat menjadi peserta aktif kegiatan “Nguda Rasa Tiyang Tani”
	Seminar “PERAN LSM DALAM PENDIDIKAN POLITIK WARGA NEGARA”	Pendidikan Kesadaran Partisipasi politik bagi Anak Muda	Kegiatan seminar dilaksanakan oleh bakesbangpol kabupaten Gunung Kidul di dukung oleh Satunama	Satunama menyediakan narasumber untuk mengisi materi yang dibutuhkan oleh Badan Kesatuan

				Bangsa dan Politik.
<b>2013</b>	Pelatihan Kepemimpinan Desa Yang berkelanjutan tahap	Peningkatan Kapasitas bagi pemerintah desa dan Kader dalam bidang perencanaan desa dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya	Kegiatan dilaksanakan di Desa Banjaroya Kalibawang Kulonprogo, Desa Karangtalun Imogiri, dan di Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul.	Kordinasi dan pemberian Informasi dilaksanakan dengan Pihak Desa dan Kecamatan untuk pelaksanaan program Kepemimpinan Komunitas yang Berkesinambungan
	Acara “Wiwit” Desa Karangtalun, Imogiri, Bantul	Ada kegiatan terkait dengan pelestarian budaya lokal dalam bidang pertanian, yakni proses pasca panen	Melakukan proses perumusan kebutuhan berdasar perencanaan, kemudian melakukan perumusan secara bersama alur kegiatan, narasumber dan metode pelatihan	Pemdes memberikan dukungan kepada kegiatan untuk proses pengembangan Organisasi Usaha Karangtalun Bangkit(OU KB)
	Koordinasi awal persiapan Pelatihan Motivasi Kewirausahaan Desa	Mereview perencanaan program usaha kelompok yang sudah dilakukan dan akan dikembangkan selanjutnya	Mendiskusikan usulan membentuk kelompok pelaku usaha desa baru dan meningkatkan motivasi dan inovasi pengembangan	Dukungan dari pemerintah Desa di Desa Banjaroya Kalibawang Kulonprogo, Desa

			usaha dari 20 pelaku usaha desa untuk menghasilkan inisiatif mengembangkan model one village one product	Karangtalun Imogiri, dan di Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul.
	Koordinasi dengan Desa tentang Kegiatan sosialisasi UU Desa	Memberikan informasi tentang tata kelola desa berdasar UU Desa	Menghubungi pemerintah desa untuk melakukan kegiatan bersama	Dukungan Pemerintah Desa dalam penyediaan sarana dan prasarana kegiatan, Dukungan Satunama dalam memberikan materi dan proses fasilitasi
	Kampanye Tanaman Obat dengan Media Kethoprak di Dusun Gunung Kelir	Mengkampanyekan tanaman Obat yang ada disekitar pekarangan rumah, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pertolongan pertama bagi	Kegiatan dilaksanakan dengan mengajak partisipasi aktif warga sekitar untuk menjadi tokoh dalam ketoprak yang akan dilaksanakan.	Warga didukung oleh Pemerintah Dusun Gunung Kelir merumuskan tema dan pesan yang akan disampaikan melalui kethoprak. Satunama membantu memfasilitasi ide dan gagasan



		masyarakat dusun Gunung kelir.		pengembangan pesan.
	Sekolah Perempuan di Dengok, Playen Gunung Kidul	Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan memberikan perhatian kepada masyarakat dampingan di Playen, Gunung Kidul. Terutama kelompok Perempuan	Proses dilaksanakan dengan : Melakukan persiapan internal untuk sekolah perempuan, melakukan proses rekrutmen peserta dan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa	Satunama mencari dukungan dari pemerintah desa, namun karena kesibukan dari pemdes, maka peran lebih banyak dimainkan oleh Satunama
	Seminar dan Loklatih Pendidikan Politik : Perempuan & Politik: Menjadi Pemilih yang Kritis dalam Pemilu 2014	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Kewarganegaraan di berbagai level.	SATUNAMA bekerjasama dengan Kesbangpol dan Pemkab Gunungkidul menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat daya kritis warga khususnya	Dukungan pemerintah kabupaten dan kecamatan untuk menggalang kehadiran peserta dari perwakilan kecamatan dan

		Salah satu bagian penting yang menjadi isu utama dalam pendidikan kritis adalah kaum perempuan perdesaan. Menjelang Pesta Demokrasi 2014	perempuan sebagai subjek pemilih potensial di Pemilu 2014 dengan Pendidikan Politik yang dikemas melalui kegiatan seminar maupun Lokalatih di tingkat Kabupaten maupun Dapil	perwakilan di 5 Dapil yang ada di wilayah Gunungkidul.
<b>2014</b>	Pertemuan Koordinasi program Satunama dan Perwakilan 3 Desa.	Melakukan analisis Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga yang telah disusun oleh kelompok masyarakat di ketiga wilayah kerja dan Sharing rencana project tahun ketiga.	Melakukan Tehnical Assitance kepada kelompok masyarakat	Satunama berperan sebagai Pendamping Lapangan yang memberikan Tehnical Assintance kepada kelompok masyarakat yang ada di 3 Desa.
<b>2015</b>	Menghubungkan Kelompok Anak – anak Banjaroyo untuk akses dana kegiatan ke	Kegiatan ini bertujuan mencari alternative pendanaan untuk kelompok anak di Desa, untuk	Satunama memfasilitasi proses pertemuan kelompok anak dan pemerintah desa	Mekanisme : meminta kepada pemdes untuk mengalokas

	Desa.	berkegiatan.		ikan dana bagi pengembangan kegiatan anak
	Narasumber Pengalaman Pengorganisasian Ekonomi Perempuan dalam Rangka Rapat Koordinasi BPPM Prop DIY.	Kegiatan ini merupakan salah satu upaya berjejaring dengan pemerintah dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat BPPM Prop DIY.	Proses :Dinas/ Instansi yg ada di Prop DIY berjejaring dengan Beberapa LSM dalam program pemberdayaan Ekonomi.	Mekanisme : Satunama menjadi salah satu pengurus Forum PPEP Prop DIY
	Kegiatan bersama BKKBN Kab Sleman, Pembahasan Naskah Akademik Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan	Kegiatan ini sebagai salah satu upaya berjejaring dengan pemerintah dalam upaya pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan Anak.	Satunama terlibat aktif menghadiri diskusi dalam jaringan yang memperhatikan isu perempuan dan anak	Dinas/ Instansi yg ada di Kab Sleman bekerjasama dengan Beberapa LSM di Sleman yang peduli pada hak anak.
	Pameran Gula Semut di Wates Expo.	Kegiatan ini sebagai media bagi KUEP Banjoroyo untuk ajang mempromosikan produk baru hasil dampingan Satunama kepada masyarakat dan juga ke Pemda Kulonprogo.	Mengundang dan melibatkan Dinas-dinas dan perwakilan kecamatan serta instansi swasta yang ada di Kulonprogo	Dinas terkait memberikan dukungan teknis kepada kelompok dampingan Satunama

	<b>Penguatan Organisasi Warga menuju Perkampungan Sehat</b>	Terwujudnya pemukiman/perkampungan yang sejahtera dan adil bagi kaum miskin kota yang termarginalkan melalui reformasi perkotaan	Kegiatan dilaksanakan di kawasan urban, dibantaran kali winongo.	Pertemuan lintas komunitas tentang advokasi atas hak warga perkampungan melibatkan pemerintah (desa, kota, propinsi) dan kader kelompok (laki-laki, perempuan, kaum muda dan anak) di tiga wilayah.
	Debat Terbuka Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sleman 2015	Warga Kabupaten Sleman mendapatkan informasi yang cukup untuk memilih pasangan cabup-cawabup yang paling layak memimpin Kabupaten Sleman satu periode mendatang. Memberikan pendidikan politik kepada pemilih untuk	Mengundang calon bupati dan wakil bupati terpilih untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja 5 tahun. Panelis melontarkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan situasi kebijakan publik dan pemenuhan hak warga di Kabupaten Sleman.	Program diabdikan untuk menyumbang pendidikan politik kepada pemilih agar mampu menggunakan hak politik secara cerdas, sehat, dan beradab.

		terlibat menyumbang pembangunan proses politik yang bersih, sehat, dan manusiawi.		
<b>2016</b>	Refleksi Desa Prima	merintis sinergitas multipihak	Desa Prima, Anggrek Bulan, Desa Ngargossari, Kecamatan Samigaluh, Kulon Progo.melakukan evaluasi dan refleksi bersama dengan SATUNAMA dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM).	BPPM DIY tahun 2014,memberikan stimulus finansial sebesar 37 juta , untuk dikelola dan dioptimalkan untuk mendukung usaha anggota
<b>2017</b>	Pra – MusDes Sendangadi	Melakukan urun-rembug untuk merancang persiapan penyelenggaraan Musyawarah Desa berdasarkan tata tertib (tahapan) dan sistem pengambilan Keputusan Musyawarah Desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	MusDes itu masih baru buat di Desa Sendangadi, Pemerintah Desa juga masyarakat Sendangadi harus mempersiapkan rincian tahapnya. Satunama membantu proses persiapan musyawarah desa	Satunama memfasilitasi proses pra-musyawarah desa. Sementara BPD melakukan pemetaan aspirasi masyarakat dan identifikasi kondisi obyektif desa sebagai dasar untuk menetapkan hal yang

				bersifat strategis. Selanjutnya BPD melakukan persiapan teknis kegiatan seperti pembentukan panitia, dan kelengkapan administrasi.

*Sumber: Departemen Human and Resource Satunama*

Dari data realisasi program diatas telah menjelaskan bahwa adanya konsistensi yang diterapkan oleh satunama dalam menjalankan program yang sesuai dengan visi-misi yang telah dibuat. Berdasarkan dokumen laporan yang ada, dalam kurun waktu tahun 2012 – 2016, hampir setiap tahun ada (lahir) program baru di SATUNAMA, terlepas besar-kecilnya program. Dalam kondisi tidak mudahnya mencari mitra untuk mendukung program-program baru, kondisi semacam ini merupakan kondisi yang baik untu SATUNAMA. Kecuali program lama yang masih berjalan seperti CEFIL, terlepas dari besar-kecilnya program, dalam kurun waktu 5 tahun tersebut telah lahir 22 program baru. Pada kurun waktu 5 tahun tersebut, program baru yang paling banyak lahir pada tahun 2016 (7 program). Dari aspek cakupan wilayah program, yang paling besar adalah program PCB – Politik Cerdas Berintegritas yang mencakup 9 propinsi kerjasama dengan KPK. Bahkan program ini akan diperluas menjadi 19 propinsi pada tahun

2017. Dari 22 program baru, secara substansial mempunyai kaitan benang merah cukup kuat dengan Perencanaan Strategis 2012 – 2017, baik pada level *Goal*, *Purpose* maupun *Output*.

### **2.5.1 Proses Pengusulan dan Pelaksanaan Program Kerjasama**

#### **a. Proses Pengusulan**

Pada tahap pengusulan kegiatan, khususnya di departemen Penguatan Masyarakat dan Desa mayoritas adalah diajak oleh Pemerintah. Diantaranya seperti di Pajangan, Provinsi Jawa Tengah, Rembang. Di Rembang untuk inisiasi usaha produktif dan kader local desa dengan BNT. Dalam usulan kerjasama tersebut, pemerintah melihat bahwa di Satunama khususnya di Departemen Penguatan Masyarakat dan Desa mempunyai pencapaian program yang memiliki kesamaan dengan program yang dimiliki oleh Pemerintah. Namun tidak hanya pemerintah, LSM SATUNAMA juga melakukan pengusulan kerjasama dengan Pemerintah, seperti halnya yang sedang dilaksanakan oleh SATUNAMA pada akhir tahun ini yaitu dengan pemerintah Kota Yogyakarta dalam program Urban. Program Urban ini dilaksanakan di Aliran sungai Winongo yang dalam pelaksanaan programnya SATUNAMA berkomunikasi dengan BAPEDDA Kota Jogjakarta dan juga dengan forum komunikasi SDGes Yogyakarta dalam mendiskusikan tentang inisiasi sistem informasi sungai dan perkotaan. Hal yang

melatarbelakangi adanya program tersebut yaitu integrasi data yang selama ini dilihat bahwa proses-proses perencanaan pembangunan di Yogyakarta, program-program pemerintah kota Jogja khususnya terkait dengan penanggulangan kemiskinan masih terdapat celah-celah yaitu tidak tepat sasaran. Hal tersebut dikarenakan data yang berbeda-beda dari Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Bappeda, BPS.

Dari permasalahan di atas lah yang melatarbelakangi keinginan SATUNAMA untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengintegritaskan seluruh data yang dalam prosesnya menyamakan semua indikator dari tiap-tiap Dinas. Program kerja SATUNAMA ini sekarang sudah sampai pada tahap audiensi dengan Pemerintah Daerah Yogyakarta dan akan berlangsung hingga Maret 2018. Dari kegiatan ini dapat dilihat konsistensi yang dilakukan SATUNAMA dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah. SATUNAMA tetap menjalankan

#### b. Proses Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, pada saat adanya pengajuan kerjasama yang diajukan oleh pemerintah Kepada SATUNAMA, hal pertama yang dilakukan adalah *assassment* yaitu menggali kebutuhan dengan menghimpun seluruh masalah maupun potensi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Setelah melakukan *assessment*, SATUNAMA dapat menarik

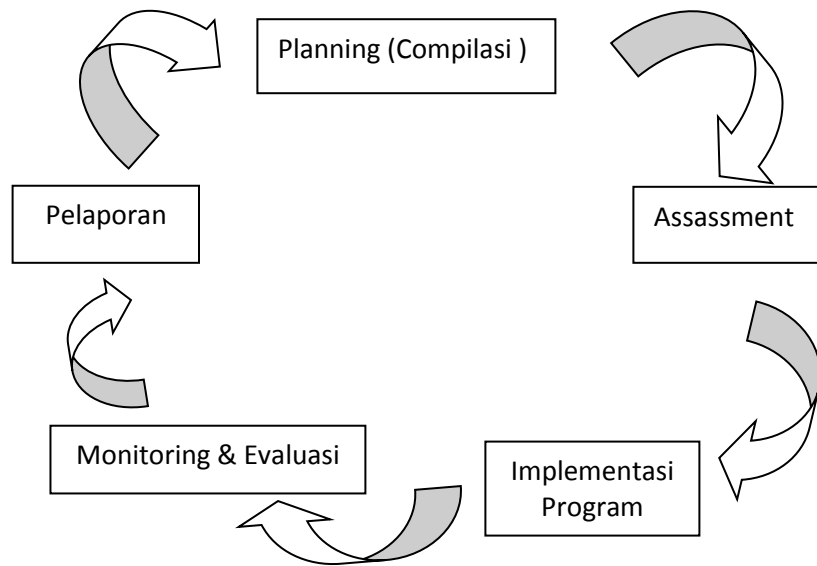


kesimpulan bahwa ada temuan terkait dengan masalah yang belum terselesaikan dan potensi masyarakat yang belum dimanfaatkan dikumpulkan dan disampaikan pada pemerintah. *Assessment* sendiri merupakan tahap kedua setelah perencanaan program yang nantinya akan menjadi langkah selanjutnya menuju tahap implementasi program/kegiatan. Setelah dilakukan *assessment*, hasil dari *assessment* tersebut akan dilaporkan ke pemerintah untuk menindaklanjuti ke tahap pelaksanaan program dengan mengadakan audiensi dengan pihak pemerintah terkait hal-hal apa saja yang harus dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Departemen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapak Asep Nanda Paramayana:

“Biasanya kami akan melakukan audiensi dengan pemerintah jika dari tahap asesment telah dilakukan dan hal tersebut yang nantinya akan menjadi langkah selanjutnya dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Dalam audiensi dengan pemerintah akan disampaikan bahwa kegiatan tersebut membutuhkan kerjasama dari banyak pihak. Dan dari assesment yang dilakukan akan memicu banyak hal terkait tindakan apa saja yang harus dilakukan, fokus isu apa yang bisa kita kerjakan bersama. Dan jika dari pemerintah setuju dan sesuai dengan program tahunan mereka, biasanya mereka akan bersambut.”

Adapun proses pelaksanaan program yang dilakukan oleh SATUNAMA, antara lain:

Gambar 2.1. *Proses pelaksanaan program SATUNAMA*



Proses pelaksanaan program kegiatan diawali dengan planning atau perencanaan program. Dalam tahap palnning tersebut ada yang dinamakan sebagai kompilasi dari berbagai perencanaan program. Kompilasi adalah suatu proses penggabungan serta menterjemahkan sesuatu (*source program*) menjadi bentuk lain. kompilasi merupakan teknik dalam melakukan pembacaan suatu program yang ditulis dalam bahasa sumber, kemudian diterjemahkan ke dalam suatu bahasa lain yang disebut bahasa sasaran. Sebagaimana yang diketahui bahwa tidak hanya satu isu yang diangkat oleh SATUNAMA dalam pembuatan program, dan isu-isu tersebut harus terkompilasi karena pasti dari isu-isu seperti sosial, pendiikan, ekonomi, Hak Asasi Manusia saling berhubungan satu sama

lain, oleh karena itu dibutuhkan kompilasi dalam tahap perencanaan program. Selanjutnya pada tahap kedua, yaitu *assessment* yang pada tahap ini mereview dari tingkat kompilasi apakah sudah tepat atau belum.

Setelah dari *assessment*, tahap selanjutnya yaitu implementasi. Pada tahap implementasi ini SATUNAMA memulai program mereka untuk terjun langsung ke masyarakat dan memulai program kegiatan mereka. Variabel yang ada dalam tahap implementasi program kegiatan SATUNAMA antara lain; Komunikasi, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta pendanaan. Komunikasi dalam pelaksanaan program kerjasama dengan pemerintah, khususnya pemerintah DIY dilakukan dengan kesepakatan bersama. Seperti mengadakan pertemuan dengan Pemerintah DIY terkait program urban yang dilaksanakan 1 (satu) minggu 2 (dua) kali untuk mengabdikan perkembangan baik dari SATUNAMA maupun pemerintah DIY. Untuk sarana prasarana dalam program SATUNAMA, SATUNAMA tidak mengajukan hal hal tersebut.

“SATUNAMA menjaga komitmen dalam hal sarana prasarana program kerjasama dengan pemerintah yaitu bukan kami yang meminta. Karena fungsi dari SATUNAMA sendiri untuk memfasilitasi masyarakat agar masyarakat posisinya setara dengan pemerintah dan masyarakat sendiri tahu apa saja yang dibutuhkan untuk diajukan ke pemerintah. Jadi SATUNAMA bukan yang meminta anggaran maupun sarana dan prasarana ke Pemerintah, karena kami tidak diperbolehkan dan harusnya masyarakat yang mengajukan kebutuhan masyarakat ke pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat pada proses perencanaan

pembangunan di Kota maupun di Desa, ada form-form perencanaan pembangunan yang harus dilengkapi salah satunya adalah masyarakat bisa mengusulkan program, atau sarana prasarana ke pemerintah ataupun bisa melalui SATUNAMA sendiri. Dan SATUNAMA hanya sebagai penghubung antara masyarakat ke pemerintah dalam pemenuhan hak-hak warga negara.”

Dalam dilakukannya sebuah kerjasama antara Yayasan SATUNAMA dengan Pemerintah, ada aturan main atau yang biasa disebut sebagai MoU (*memorandum of understanding*) dalam menjalankan program kegiatan kerjasama. Hal itu dilakukan untuk menjaga agar tanggungjawab antar kedua belah pihak terlaksana. Ada aturan main tersebut berupa perjanjian secara tertulis. Di dalam MoU yang dibuat oleh SATUNAMA dan Pemerintah, membahas terkait program dan juga pembahasan terkait anggaran. Namun, keinginan dari SATUNAMA sendiri terkait aturan main tersebut tidak ingin terjebak dari nominasi anggaran ataupun dalam ritme birokrasi. Yayasan SATUNAMA memiliki beberapa mitra-mitra donor yang dalam hal ini mitra-mitra tersebut mewajibkan SATUNAMA untuk membuat skema adanya kontribusi lokal ataupun kerjasama dengan pihak ketiga yang dituangkan ke dalam proposal dan hal itu merupakan syarat utama, oleh karena itu dalam melakukan kerjasamanya harus memiliki perjanjian atau aturan main.